

FINAL REPORT



ANALISIS KINERJA APBD DALAM MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Kerjasama:
Universitas Khairun dan
Bapelitbangda Kota Ternate

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Kegiatan	5
1.3. Nama Kegiatan.....	6
1.4. Organisasi Pengadaan Swakelola.....	7
1.5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	7
1.6. Ruang Lingkup Kegiatan.....	7
1.7. Keluaran yang Diharapkan.....	8
1.8. Pelaporan	8
BAB II TEORI DAN KERANGKA KAJIAN	10
2.1. Kinerja Keuangan	10
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
2.3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	14
BAB III METODOLOGI KAJIAN	22
3.1. Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan	22
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3. Metode Analisis	22
BAB IV <i>EXISTING CONDITION</i>.....	26
4.1. Kondisi Geografis.....	26

4.2.	Jumlah Penduduk	27
4.3.	Gambaran Ketenagakerjaan	30
4.4.	Statistik Kesejahteraan Masyarakat	36
4.4.1.	Pendidikan.....	37
4.4.2.	Kesehatan	41
4.4.3.	Perumahan	44
4.4.4.	Konsumsi.....	52
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.5.	Gambaran Kondisi Perekonomian Kota Ternate	55
5.1.1.	Struktur dan Laju Pertumbuhan Ekonomi	55
5.1.2.	Pendapatan Perkapita	59
5.1.3.	Tingkat Inflasi	63
5.1.4.	Indeks Gini	65
5.1.5.	Tingkat Kemiskinan.....	67
5.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia	70
5.1.7.	Indeks Pembangunan Gender.....	72
5.2.	Analisis Kinerja Keuangan (APBD) Kota Ternate	73
BAB	KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
6.1.	Kesimpulan.....	82
6.2.	Saran	82
	Daftar Pustaka	viii

Daftar Tabel

Tabel 4.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	27
Tabel 4.2.	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Ternate, 2022.....	28
Tabel 4.3.	Presentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan	29
Tabel 4.4.	Data Ketenagakerjaan Kota Ternate, 2023	31
Tabel 4.5.	Data Lapangan Pekerjaan Utama Kota Ternate, 2023.....	33
Tabel 4.6.	Presentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama.....	34
Tabel 4.7.	Presentase penduduk 15 tahun ke atas menurut karakteristik dan kemampuan membaca dan menulis, 2023 (BPS Kota Ternate).....	39
Tabel 4.8.	Presentase penduduk 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan, 2023.....	39
Tabel 4.9.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk menurut karakteristik dan jenis kelamin, 2023	40
Tabel 4.10.	Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat Kota Ternate, 2023	41
Tabel 4.11.	Angka kesakitan menurut karakteristik, 2023	43
Tabel 4.12.	Presentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah rawat jalan	

	menggunakan jaminan kesehatan menurut karakteristik, 2023	43
Tabel 4.13.	Persentase rumah tangga menurut karakteristik dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati, 2023	45
Tabel 4.14.	Presentase rumah tangga menurut karakteristik dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, 2023	46
Tabel 4.15.	Presentase rumah tangga menurut karakteristik dan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi /cuci/dll., 2023	47
Tabel 4.16.	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan penggunaan teknologi informasi dalam tiga bulan terakhir, 2023.....	51
Tabel 4.17.	Persentase rumah tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima pada tahun 2023	52
Tabel 4.18	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (Rupiah), 2023	53
Tabel 4.19.	Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran (Kkal), 2023	54
Tabel 5.1.	Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku 2020-2022 se-Provinsi Maluku Utara (dalam miliar rupiah).....	57
Tabel 5.2.	Pendapatan per kapita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021	61
Tabel 5.3.	Laju pertumbuhan PDRD atas dasar harga konstan	62

Tabel 5.4.	Indeks Gini kabupaten/kota dalam wilayah administrasi Maluku Utara	66
Tabel 5.5.	Indeks pembangunan manusia kabupaten/kota dalam wilayah Maluku Utara	72
Tabel 5.6.	Indeks pembangunan gender Provinsi Maluku Utara.....	73
Tabel 5.7.	Analisis rasio efektivitas pajak daerah terhadap PAD	74
Tabel 5.8.	Analisis rasio efektivitas total target PAD terhadap total realisasi PAD	74
Tabel 5.9.	Analisis rasio efisiensi	75
Tabel 5.10.	Analisis keserasian belanja operasi terhadap total belanja.....	76
Tabel 5.11.	Analisis belanja modal terhadap total belanja	78
Tabel 5.12.	Analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Ternate ...	80

Daftar Gambar

Gambar 5.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2022	58
Gambar 5.2. Gambaran Inflasi Kota Ternate	65
Gambar 5.3. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Maret 2022	68
Gambar 5.4. Grafik Penurunan Angka Kemiskinan Provinsi Maluku Utara.....	69
Gambar 5.5. Kondisi Kemiskinan di Kota Ternate	70

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Arta Sadjiarto. (2000). "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah". Jurnal Akuntansi & Keuangan. Universitas Kristen Petra
- Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara. Sakernas Agustus 2022
----- Ternate Dalam Angka, 2023
----- Susenas, Maret 2023
----- Sensus Pertanian, 2023
----- Statistik Kesejahteraan Kota Ternate, 2023
- H.Sumarjo, 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia).
- Jumingan. (2006). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksar
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nurlan Darise. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.
- Parker, Wayne C (1993). *Performance Measurement in the Public Sector. State of Utah*. www.rutgers.edu/Accounting/raw/seagov/pmg/perfmeasure, september 2000.

Susetyo, 2008. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan.

Tyas Nurulafifah. (2012). "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010". Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang selama ini disuarakan daerah telah mendapatkan tempat yang tepat, sealur dengan gelombang reformasi dan demokratisasi. Semangat pemberian hak otonom memiliki dasar filosofi yang kuat, yakni memberikan kesempatan kepada daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja secara mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Menurut Susetyo, 2008 bahwa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik.

Agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar dilaksanakan sebagaimana tujuannya, yakni memberikan pelayanan maksimal dan tepat sasaran, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan alokasi belanja pembangunan didaerah haruslah dapat diukur kinerja pengelolaan keuangannya. Tujuan mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pengalokasian anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Hal mana dapat ditunjukkan dengan ketepatan merencanakan program atau kegiatan yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung atas pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi atas alokasi belanja pembangunan, sehingga dapat mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan melalui pengalokasian anggaran pada setiap program atau kegiatan memiliki dampak atau tidak pada suatu tahun anggaran. Hal ini penting, agar dapat dijadikan sebagai basis perencanaan dan perumusan program serta kebijakan pemerintah daerah yang lebih kredibel dan bertanggungjawab kedepan.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. Pada prinsipnya, pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Menurut Jumingan (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. Maka baik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Pemerintah Daerah Provinsi diberi hak otonomi untuk merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sesuai kebutuhan dan potensi daerah, serta berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan prioritas pembangunan daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisien, dan efektifitas (Mardiasmo, 2002: 117).

Fakta menunjukkan bahwa selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya.

Penggunaan analisis Kinerja Keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu perlu suatu perubahan yang mengacu pada penggunaan analisis Kinerja Keuangan dalam pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Salah satu daerah yang menjalankan amanah penyelenggaraan otonomi daerah adalah Kota Ternate. Jika dilihat pada sisi kemandirian fiskal daerah ini, masih dikategorikan sangat rendah. Artinya bahwa pemerintah daerah Kota Ternate dalam melaksanakan program dan kegiatan sangat bergantung pada dana transfer pusat ke daerah. Kendati demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong agar kapasitas fiskal daerahnya terus mengalami peningkatan. Kondisi ini ditunjukkan dengan upaya pemerintah dalam mendorong berbagai program serta kegiatan pembangunan daerah yang difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat pada satu sisi, sedangkan disisi yang lain berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan ini merupakan sebuah langkah maju, akan tetapi sebagai upaya untuk

mengetahui seberapa besar dampak alokasi belanja pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, tentu diperlukan suatu tahapan analisis yang mendalam sehingga dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Pada konteks itu, maka studi tentang “Analisis Kinerja APBD Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah Kota Ternate” menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- **Maksud Kegiatan**

Kajian tentang Analisis Kinerja APBD Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan dan Pendapatan Daerah Kota Ternate dilakukan dengan maksud agar tersedianya bahan panduan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja APBD Kota Ternate melalui pencermatan dan pemetaan alokasi program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran

- **Tujuan Kegiatan**

Kajian tentang Analisis Kinerja APBD Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan dan Pendapatan Daerah Kota Ternate dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis Kinerja APBD Kota Ternate dari sisi Pendapatan maupun belanja
2. Menganalisis tingkat efisien dan efektifitas APBD Kota Ternate
3. Menganalisis pengaruh APBD dalam mendorong kesejahteraan Masyarakat

4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pengelolaan APBD di Kota Ternate

- **Manfaat Kegiatan**

Kajian tentang Analisis Kinerja APBD Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan dan Pendapatan Daerah Kota Ternate diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen yang dilakukan secara ilmiah berkaitan dengan analisis kinerja APBD Kota Ternate dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah
2. Memberikan informasi yang mendalam kepada pemerintah daerah berkaitan dengan kinerja APBD, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan daerah.

1.3. Nama Kegiatan

Kegiatan ini adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak alokasi belanja pembangunan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Ternate yang diberi judul **“Analisis Kinerja APBD Kota Ternate Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah”**

1.4. Organisasi Pengadaan Swakelola

Organisasi pengadaan swakelola pada kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disingkat BAPPELITBANGDA Kota Ternate.'

1.5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana pada kegiatan kajian ini berasal dari DPA Bappelitbangda Kota Ternate dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 200.000.000., *Terbilang (Dua Ratus Juta Rupiah).*

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

- Lingkup Wilayah Kajian

Lingkup wilayah kegiatan Analisis Kinerja APBD Kota Ternate Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah ini hanya berbasis pada wilayah administrasi Kota Ternate.

- Lingkup Substansi Kajian

Lingkup substansi kegiatan Analisis Kinerja APBD Kota Ternate Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Alokasi Belanja Pembangunan pada postur APBD Kota Ternate.
2. Analisis Program dan Kegiatan yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap objek kajian ini

3. Analisis derajat ketergantungan fiskal pemerintah daerah, serta seberapa besar alokasi kapasitas fiskal daerah dalam belanja pembangunan

1.7. Keluaran yang diharapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan Analisis Kinerja APBD Kota Ternate Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah adalah tersedianya dokumen yang digunakan sebagai input bagi pemerintah daerah, terutama bagi pengambil kebijakan di daerah untuk mendorong organisasi perangkat daerah agar dalam merumuskan program dan kegiatan harus berbasis pada perencanaan yang memadai sehingga arah pembangunan lebih tepat sasaran. Selain itu, kepada instansi yang berkompeten maupun TAPD dan BANGGAR agar menjadikan dokumen ini sebagai input dalam merumuskan strategi dan kebijakan perencanaan belanja daerah, serta strategi peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

1.8. Pelaporan

Kegiatan Analisis Kinerja APBD dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

- **Laporan Pendahuluan**

Laporan pendahuluan memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, alur pikir, metodologi dan sistematika penulisan.

Laporan pendahuluan disampaikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada **Bappelitbangda Kota Ternate** pada tahun 2023.

- **Laporan Antara**

Laporan antara memuat tentang latar belakang , maksud dan tujuan, sasaran, alur pikir, metodologi dan gambaran analisis awal, serta data-data primer maupun sekunder yang menjelaskan tentang analisis kinerja APBD dalam peningkatan kesejahteraan dan pendapatan daerah. Laporan antara disampaikan sebanyak 3 eksemplar kepada **Bappelitbangda Kota Ternate**.

- **Laporan Akhir**

Laporan akhir merupakan hasil penyempurnaan dari laporan antara yang telah dilakukan analisis dan pembahasan berkaitan dengan objek yang diharapkan outputnya relevan dan menjadi input bagi pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengalokasi anggaran program/kegiatan yang lebih tepat sasaran. Laporan akhir dan lampiran-lampiran hasil analisis harus disampaikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada **Bappelitbangda Kota Ternate**.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA KAJIAN

2.1. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Pada dasarnya kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan 2006:239). Menurut Nurlan Darise (2008:51) Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Berdasarkan definisi Kinerja Keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat” Hendro Sumarjo dalam Tyas Nurulafifah (2012). Menurut Abdul Halim (2007) Kinerja Kuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatann

atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

Menurut Juminghan (2006) mengemukakan bahwa tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah, *pertama*; mengetahui sejauhmana keberhasilan pengelolaan keuangan dari sisi kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. *Kedua*; mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan sebagaimana dimaksud, maka disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang. Sementara dari sisi kemanfaatan, pengukuran kinerja keuangan memiliki 5 (lima) manfaat sebagaimana dikemukakan oleh Wayne C. Parker (1996:3) dalam Arta Sadjiarto (2000), yakni, *pertama*; Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja keuangan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja keuangan untuk melihat

kesuksesan program yang ada. *Kedua;* Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas internal. Adanya pengukuran kinerja keuangan ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti *management by objectives* untuk *mengukur output dan outcome*.

Ketiga; Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi Kinerja Keuangan organisasi kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran Kinerja Keuangan yang baik. *Keempat;* Pengukuran Kinerja Keuangan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur Kinerja Keuangan dan kemampuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai objektif. *Kelima;* Pengukuran Kinerja Keuangan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif. Berdasarkan manfaat pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah di atas, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal yang dihasilkan melalui kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang pendapatan dan belanja yang ditetapkan melalui suatu peraturan untuk memayungi pelaksanaan kegiatan pemerintah, serta diharapkan mampu menyelenggarakan secara sepenuhnya pembiayaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai *fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran*.

Fungsi Otorisasi Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. **Fungsi Perencanaan Anggaran daerah** merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. **Fungsi Pengawasan Anggaran daerah** menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. **Fungsi Alokasi Anggaran daerah** diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. **Fungsi Distribusi Anggaran daerah** harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. **Fungsi Stabilisasi Anggaran daerah** harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu : a. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran. Apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Berdasarkan realisasi anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara : 1). Analisis Varians Pendapatan Daerah Analisis Varians Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*). Berikut ini rumus untuk menghitung Analisis Varians pendapatan Daerah:

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka Kinerja Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pengukuran Kinerja Keuangan adalah mengevaluasi Kinerja Keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan. Melihat keadaan dan masalah yang ada maka pengukuran Kinerja Keuangan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend (pertumbuhan) dan analisis rasio. Analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dapat dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan yang meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat

Kontribusi BUMD. Sementara analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Melihat Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Belanja Daerah, maka dapat dinilai Kinerja Keuangan APBD secara umum, jika semua Kinerja Keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Keuangan APBD adalah baik.

2). Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Analisis

Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya. Berikut ini rumus untuk Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah:

$$\frac{\text{Pend. Tahun } t - \text{Pend. Tahun } (t - 1)}{\text{Pend. Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

3). Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a]. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

b]. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi.

C]. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat menghitung Rasio Efisiensi Pajak Daerah diperlukan data tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak

daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara: 1) Analisis Varians Belanja Daerah Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni selisih disukai dan selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

Selain analisis varian kinerja keuangan dan belanja daerah juga dapat dilakukan melalui analisis pertumbuhan belanja daerah yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja Daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis keserasian belanja. Analisis ini dilakukan

untuk memberikan penggambaran bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja, melalui analisis belanja operasi terhadap total belanja. Analisis ini dalam rangka memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

Lebih lanjut, kinerja keuangan diharapkan mampu memberikan stimulus dalam akselerasi pembangunan. Oleh karenanya diperlukan analisis belanja modal terhadap total belanja. Nilai rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya

adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Hal penting lainnya adalah analisis efisiensi belanja daerah, rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Kerangka Pemikiran

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka Kinerja Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pengukuran Kinerja Keuangan adalah mengevaluasi Kinerja Keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan. Melihat keadaan dan masalah yang ada maka pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota Ternate dapat dilakukan dengan mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend (pertumbuhan) dan analisis rasio. Analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya

tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dapat dinilai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan dapat dihitung dengan cara Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dan Analisis Rasio Keuangan yang meliputi Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis Keserasian Belanja daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Melihat Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Belanja Daerah, maka dapat dinilai Kinerja Keuangan APBD secara umum, jika semua Kinerja Keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Keuangan APBD adalah baik.

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1. Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Lokasi kegiatan Analisis Kinerja APBD Kota Ternate Dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Daerah dilaksanakan di Kota Ternate, dengan jangka waktu pelaksanaan kajian selama 5 (Lima) bulan dari bulan April-Agustus 2023.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, serta sumber data dari pemerintah daerah maupun instansi lain yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat kevalidannya. Adapun data yang dibutuhkan adalah struktur anggaran pendapatan belanja daerah maupun laporan realisasi anggaran dalam 3 sampai 5 (lima) tahun.

3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Analisis ini untuk mengetahui rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen, untuk dapat

menghitung Rasio Efisiensi Pajak Daerah diperlukan data tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Efektifitas dan EfisiensiPajak Daerah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Keserasian Belanja

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa :

- a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanjadaerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya, pemerintah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan

tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek. Rumus yang digunakan untuk melakukan analisis adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Berikut ini rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah :

Rasio Ketergantungan Keuangan =

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

EXISTING CONDITION

4.1. Kondisi Geografis

Kota Ternate merupakan kota yang terletak di Indonesia bagian timur di Provinsi Maluku Utara. Kota ini terletak pada posisi 02°28'54,51" Lintang Selatan, 02°39'28,76" Lintang Utara, dan berada di antara 124°16'58,62" - 129°40'57,62" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Ternate berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan di sebelah Selatan. Luas Kota Ternate adalah 5.709,72 Km², yang terdiri dari daratan 162,20 Km² dan lautan 5.547,52 Km². Kota Ternate merupakan kota kepulauan dengan letak Ibukota adalah Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yakni Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang berada di sana yakni Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat.

Tiga kecamatan lainnya berada di luar Pulau Ternate, sehingga jaraknya dengan Ibukota Kota Ternate cukup jauh. Kecamatan terjauh jaraknya yakni Kecamatan Pulau Batang Dua yang berjarak 121,6 km dari pusat kota. Posisinya berada di Pulau Mayau dan Tifure, yang terletak di tengah perairan Laut Maluku. Kota Ternate memiliki luas wilayah menurut kecamatan sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:

Tabel.4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
Pulau Ternate	Jambula	17,39
Moti	Kota Moti	24,78
Pulau Bantang Dua	Mayau	29,03
Pulau Hiri	Faudu	9,72
Ternate Barat	Sulamadaha	33,88
Ternate Selatan	Kalumata	20,22
Ternate Tengah	Salahuddin	13,26
Ternate Utara	Dufa-Dufa	13,92
Kota Ternate		162,20

Sumber : Ternate Dalam Angka, 2023 (BPS)

4.2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Ternate berdasarkan Sensus penduduk tahun 2022 sebanyak 206.745 jiwa. Jumlah rasio jenis kelamin Penduduk Kota Ternate pada tahun 2022 adalah 101. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota Ternate, 2022, sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut :

**Tabel 4.2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi
Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Ternate, 2022**

Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
	Proyeksi	Registrasi	
Pulau Ternate	8,82	8,67	0,0040
Moti	4,85	4,84	0,0032
Pulau B. Dua	2,82	2,88	0,0032
Pulau Hiri	2,95	2,97	0,0032
Ternate Barat	8,86	9,03	0,0032
Ternate Selatan	74,96	70,97	0,0032
Ternate Tengah	54,10	54,08	0,0032
Ternate Utara	49,40	48,48	0,0032
Kota Ternate	206,75	201,92	0,0032

Sumber : Ternate Dalam Angka, 2023 (BPS)

Selanjutnya untuk persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan dalam wilayah administrasi Kota Ternate secara rinci dijelaskan sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan

Kecamatan	Persentase penduduk	Kepadatan penduduk per km ²
Pulau Ternate	4,27	507,42
Moti	2,35	195,80
Pulau Bantang Dua	1,36	96,97
Pulau Hiri	1,43	303,19
Ternate Barat	4,29	261,57
Ternate Selatan	36,25	3706,97
Ternate Tengah	26,17	4079,56
Ternate Utara	23,89	3548,49
Kota Ternate	100,00	1.274,63

Sumber : Ternate Dalam Angka, 2023 (BPS)

Berdasarkan data sebagaimana pada tabel 4.3. dikemukakan bahwa kepadatan penduduk di Kota Ternate tersebar pada 3 (tiga) kecamatan. Yakni kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Tengah dan Kota Ternate Utara. Sedangkan, pada beberapa kecamatan lainnya masih relative kurang terlalu mengalami kepadatan penduduk. Dengan kondisi ini, maka pengembangan bagian wilayah kota harus mempertimbangkan rasio kepadatan penduduk dengan luas wilayah yang tersedia, sehingga mampu mengantisipasi terjadinya pemusatan titik pertumbuhan pada sebagian wilayah kota.

4.3. Gambaran Ketenagakerjaan

Data Ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan pasar tenaga kerja di Indonesia. Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Secara umum konsep dan Definisi Ketenagakerjaan yang digunakan Badan Pusat Statistik merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku “Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment”, an ILO Manual On Concept and Methods, ILO 1992. Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (Standard Labour Force Concept) (BPS, Kota Ternate 2023).

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK adalah indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang secara aktif secara ekonomi dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei/sensus. Rumus TPAK: $TPAK = \frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Kerja} \times 100\%$ Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk

mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Analisis Ketenagakerjaan Kota Ternate Berdasarkan sampel Sakernas Agustus 2023 , diperoleh jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Ternate sebanyak 105.429 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 27.354 penduduk angkatan kerja dan 78.075 penduduk yang bukan angkatan kerja. sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK Kota Ternate pada periode Agustus 2023 sebesar 55.48. Angka tersebut merupakan proporsi jumlah angkatan kerja (189.955 jiwa) terhadap jumlah penduduk usia kerja (105.429 jiwa). Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2021, TPAK mengalami penurunan sebesar 0,3 persen dimana pada periode Agustus 2023 TPAK mencapai angka 55.48 Data ketenagakerjaan selengkapnya disajikan pada tabel 4.4. berikut ini :

Table. 4.4. Data Ketenagakerjaan Kota Ternate, 2023

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki+Perempuan
1	2	3	4
Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	68.536	36.893	105.429
Angkatan Kerja	95.922	94.033	189.955
Bekerja	68.536	36.893	105.429

Pengangguran	3.704	2.747	6.451
Bukan Angkatan Kerja	30.3	69.6	99.9
TPAK	36.08	19.4	55.48

Sumber: BPS Ternate, Sakernas Agustus 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4. dikemukakan bahwa, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas periode Agustus 2022 mencapai 105.429 orang. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa partisipasi laki-laki dalam pasar tenaga kerja lebih tinggi dibanding perempuan yang dapat dilihat dari angka TPAK. Hal ini merupakan fenomena yang umum terjadi dan disebabkan karena sebagian besar perempuan masih mengemban tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Pada Agustus 2023, TPAK laki-laki mencapai 36.08 persen sementara pada perempuan hanya 19.4 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk laki-laki yang berusia kerja, yang termasuk angkatan kerja sekitar 74 sampai 75 orang, sementara untuk perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja, hanya sekitar 43 sampai 44 orang yang termasuk angkatan kerja. Sementara, jika dilihat penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menunjukkan bahwa Kondisi lapangan pekerjaan utama di Kota Ternate pada Agustus 2023 di dominasi oleh sektor jasa dengan persentase sebesar 77.4 persen. Selanjutnya adalah sektor manufaktur sebesar 12.1 persen dan pertanian sebesar 10.4 persen. Keterangan yang lebih rinci terkait dengan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel, 4.5. Data Lapangan Pekerjaan Utama Kota Ternate, 2023

Lapangan pekerjaan utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian	11,9	7,64	10,4
Manufaktur	13,3	9,89	12,13
Jasa	74,71	82,45	77,43
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Ternate, Sakernas Agustus 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.5. dikemukakan bahwa jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Ternate yang bekerja di sektor manufaktur di dominasi oleh pekerja laki-laki sedangkan sektor jasa didominasi oleh pekerja perempuan. Selanjutnya jika dicermati data pengangguran, maka berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate adalah sebesar 55,48 persen. Dari sisi tingkat pendidikan, pengangguran di Kota Ternate didominasi oleh lulusan Universitas (Gambar 3.4). Dapat diasumsikan bahwa pada kelompok universitas berada pada kondisi tidak aktif, atau mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha. Beberapa kemungkinan alasan banyaknya pengangguran berpendidikan tinggi (dalam hal ini lulusan diploma/ perguruan tinggi) bisa jadi dikarenakan ketidakmauan untuk bekerja pada sektor informal. Selain itu, bisa jadi juga karena tidak ada pekerjaan yang berpenghasilan layak/memuaskan bagi pengangguran berpendidikan tinggi tersebut. Dari sisi jenis kelamin, jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu penduduk

laki-laki berjumlah 3.704 orang sedangkan perempuan 2.747 orang. Dapat diasumsikan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak berada pada kondisi tidak aktif, atau mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha. Secara substantif fungsi utama data ketenagakerjaan yang dihimpun lewat Sakernas adalah sebagai early warning system terhadap masalah yang potensial timbul di bidang ketenagakerjaan. Terdapat tiga point penting dalam penelaahan atas kondisi ketenagakerjaan di Kota Ternate, sebagai berikut :

1. Keadaan ketenagakerjaan Kota Ternate pada periode Agustus 2022 dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,7%
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate tahun 2022 sebesar 55,48 %
3. Salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan adalah EPR. Pada Agustus 2022, EPR Kota Ternate sebesar 55,50%.

Lebih lanjut jika dilihat dari sisi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama, maka data menunjukkan sampai Agustus 2022 kondisi penduduk yang bekerja dengan jenis pekerjaan utama di Kota Ternate sebagai berikut :

Tabel.4.6. persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama

Status dalam pekerjaan utama	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Bekerja dengan menerima upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	53,7	17,9	52,85
Berusaha	39,08	36,59	38,27

Berusah Sendiri	32.3	27,9	30,82
Berusaha dibantu buruh/pegawai	6,78	8,69	7,45
Pekerja Bebas	4,76	1,77	4,84
Pekerja Keluarga	2.33	10,38	8,82
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Agustus 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.6. dikemukakan bahwa mayoritas dari total penduduk yang bekerja di Kota Ternate pada Agustus 2022, memiliki status pekerjaan utama sebagai penerima upah (buruh/karyawan/pegawai) yaitu sebesar 52,85 persen. Adapun persentase penduduk yang berstatus pekerja bebas (baik di pertanian maupun non-pertanian) memiliki persentase yang paling kecil yaitu hanya sekitar 4,84 persen. Dari sisi jenis kelamin, persentase pekerja bebas lakilaki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada umumnya pekerja bebas memerlukan kemampuan fisik yang utama, sehingga <https://ternatekota.bps.go.id> Indikator Ketenagakerjaan Kota Ternate 2023 35 dalam hal ini pekerja bebas laki-laki memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja bebas perempuan. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dihitung jumlah pekerja yang tergolong “Pekerja Rentan”. Pekerja Rentan adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas (baik di pertanian maupun nonpertanian), dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Dikatakan rentan sebab pekerjaan mereka sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan seperti cuaca atau fluktuasi ekonomi. Sebagai contoh, kondisi cuaca yang kurang baik

menyebabkan nelayan terpaksa tidak melaut untuk sementara, dan sebagainya. Jumlah pekerja yang tergolong rentan di Kota Ternate pada tahun 2023 mencapai 42.29 Persen. (BPS,2023).

4.4. Statistik Kesejahteraan Masyarakat

Pada era Sustainable Development Goals (SDGs), Data Revolution, Big Data, dan Nawacita seperti sekarang ini, informasi capaian pembangunan merupakan sumber data utama bagi para pemangku kebijakan dalam merencanakan pembangunan nasional. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, analisis Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate 2023 merupakan publikasi yang menyajikan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Kota Ternate. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2023). Publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pembangunan di Kota Ternate, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber data untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kota Ternate (BPS, Kota Ternate, 2023).

Melalui Susenas akan menghasilkan beragam statistik lintas sektor meliputi: partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis, APS, APK, serta APM untuk bidang pendidikan; gangguan kesehatan, pemanfaatan jaminan kesehatan, perilaku merokok, pemberian imunisasi pada balita dan

ASI pada baduta, tempat melahirkan dan penolong persalinan, serta partisipasi KB untuk bidang kesehatan, fertilitas dan KB; kondisi tempat tinggal, sumber air untuk mandi dan mencuci untuk bidang perumahan; kepemilikan HP, akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Susenas juga mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, baik untuk komoditas makanan maupun bukan makanan. Dari data tersebut diperoleh rata-rata konsumsi dan pengeluaran rumah tangga serta rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita. Data konsumsi dan pengeluaran yang dirinci menurut kelompok komoditas dapat memberikan gambaran mengenai pola konsumsi penduduk di suatu wilayah.

4.4.1. Pendidikan

Dari sisi pendidikan variabel yang dijadikan indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah:

1. dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis katakata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a-z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh huruf jawa, kanji, dll).
2. Tidak/belum pernah bersekolah adalah anggota rumah tangga berumur lima tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar/sederajat.

3. Masih bersekolah adalah anggota rumah tangga berumur lima tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.
4. Tidak bersekolah lagi adalah anggota rumah tangga berumur lima tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
5. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
6. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan nonformal (Paket A/B/C), baik di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.
7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
8. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Berdasarkan indikator sebagaimana dikemukakan, maka beberapa data yang tersaji pada tabel dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.7. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2023 (BPS, Kota Ternate)

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya ¹
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	100.00	38.25
Perempuan	99.77	37.98
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	99.71	33.67
40 Persen Tengah	99.99	42.08
20 Persen Teratas	99.99	38.52
Kota Ternate	99.88	38.11

Sumber : BPS, Susenas Maret 2023

Tabel 4.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2023

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	NA	10.17	5.30	13.41	67.49	100
Perempuan	NA	10.32	4.16	15.97	67.06	100
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	NA	12.04	6.13	14.13	63.64	100
40 Persen Tengah	NA	10.39	3.59	14.52	69.28	100
20 Persen Teratas	NA	6.42	4.16	16.24	70.48	100
Kota Ternate	NA	10.25	4.72	14.71	67.27	100

Sumber : BPS, Susenas Maret 2023

Tabel 4.9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2023

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	99.94	99.01	99.47
13 – 15 tahun	98.12	98.19	98.16
16 – 18 tahun	85.59	87.78	86.74
19 – 23 tahun	• 38.87	57.52	49.01
APM			
SD	97.15	99.01	98.08
SMP	85.55	71.68	78.85
SMA	72.04	66.28	69.02
PT	31.70	47.08	40.07

Sumber : BPS, Susenas Maret 2023

Berdasarkan data angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni sebagaimana tersaji pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata penduduk menyelesaikan jenjang pendidikan menurut usia secara umum sangat tinggi, baik dari usia 7-12 tahun, 13-15 tahun maupun 16-18 tahun. data mengkonfirmasi bahwa penduduk Kota Ternate memiliki tingkat partisipasi sekolah sangat tinggi. Dimana, sebagian besar penduduk mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA dan sederajat. Kendati demikian, kondisi ini tidak selaras dengan angkat partisipasi sekolah ke jenjang Perguruan tinggi. Hal diduga bahwa banyak penduduk di Kota Ternate setelah tamat sekolah pada tingkatan SMA dan sederajat lebih memilih untuk bekerja, baik pada sektor formal maupun informal.

Tabel 4.10. Karakteristik Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Ternate, 2023

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	1.58	10.18	20.02	68.22
Perempuan	2.77	10.15	22.55	64.53
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	4.36	13.39	23.42	58.83
40 Persen Tengah	0.95	8.86	23.39	66.80
20 Persen Teratas	NA	6.82	13.50	79.04
Kota Ternate	2.19	10.16	21.31	66.33

Sumber : BPS, Susenas, Maret 2023

4.4.2. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, 92,63% penduduk perempuan di Kota Ternate saat melahirkan difasilitasi kesehatan dan 100% dibantu oleh petugas kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Ternate, 2023. Beberapa defenisi berkaitan dengan indikator kesehatan adalah Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya. Sakit adalah mempunyai keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari. Rawat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan

mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota rumah tangga.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Merokok tembakau adalah aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Balita disebut telah mendapat imunisasi dasar lengkap bila telah mendapat imunisasi BCG sebanyak satu kali, imunisasi Hepatitis B sebanyak tiga kali, imunisasi DPT sebanyak tiga kali, imunisasi Campak sebanyak satu kali, dan imunisasi Polio sebanyak tiga kali.

Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tandatanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Penolong persalinan adalah penolong terakhir dalam proses persalinan sampai dengan kala tiga (keluarnya plasenta/ari-ari bayi). Fasilitas kesehatan meliputi RS Pemerintah, RS Swasta, Rumah Bersalin/Klinik, Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes, dan

Tempat praktik tenaga kesehatan. Penolong persalinan tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, dan perawat.

Tabel 4.11. Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	5.05
Perempuan	6.79
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	5.73
40 Persen Tengah	4.94
20 Persen Teratas	8.32
Kota Ternate	5.93

Sumber : BPS, Data Susenas, Maret 2023

Tabel 4.12. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	76.16
Perempuan	84.01
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	78.80
40 Persen Tengah	87.22
20 Persen Teratas	73.93
Kota Ternate	80.93

Sumber : BPS, Susenas, Maret 2023

4.4.3. Perumahan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Ternate 2023, dikemukakan bahwa 80,28% penduduk di Kota Ternate menggunakan sumber air PDAM (leding) sebagai sumber air mandi dan mencuci. Sementara 88,90% penduduk memiliki tempat buang air secara pribadi (sendiri). Secara teknis, Badan Pusat Statistik memberikan pendefenisian indikator perumahan berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya *pertama*; kepemilikan bangunan adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota rta yang mendiaminya. Terdiri atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bersama, dan lainnya. *Kedua* :Milik sendiri merupakan status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan bangunan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Ketiga: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan untuk aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Lebih lanjut, beberapa data berkaitan dengan aspek perumahan dikemukakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.13. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2023

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	79.70	20.30	100.00
Perempuan	91.81	8.19	100.00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	81.13	18.87	100.00
40 Persen Tengah	78.34	21.66	100.00
20 Persen Teratas	86.34	13.66	100.00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	86.36	13.64	100.00
SMP ke atas	80.31	19.69	100.00
Kota Ternate	81.29	18.71	100.00

Sumber : BPS, Susenas, Maret 2023

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel 4.13. menunjukkan bahwa secara umum kepemilikan bangunan (rumah) penduduk di Kota Ternate adalah milik sendiri, yakni sebesar 79,70 % dengan karakteristik kepemilikan adalah laki-laki, sedangkan perempuan sebesar 91,81%. Data ini mengkonfirmasi bahwa status kepemilikan bangunan (rumah) di Kota Ternate di dominasi oleh perempuan. Sementara penduduk dengan kepemilikan rumah bukan milik sendiri didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 20,30% dan 8,19% untuk perempuan. Lebih lanjut untuk karakteristik pendidikan tertinggi menurut kepala rumah tangga menunjukkan fenomena yang sangat menarik. Dimana kepemilikan bangunan milik sendiri di dominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi SD ke bawah, yakni sebesar 86,36%. Sedangkan untuk karakteristik kepemilikan bangunan untuk

SMP ke atas sebesar 80,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa *effort* untuk memiliki rumah sendiri bagi penduduk kota ternate justru terletak pada penduduk dengan tingkat pendidikan yang sangat minim. Kondisi ini tidak berarti atau dapat dijadikan justifikasi bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi tidak memiliki kemauan yang tinggi untuk memiliki rumah atau bangunan sendiri, akan tetapi kecenderungan penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih memilih tempat yang lebih nyaman maupun dekat dengan pusat-pusat aktivitas maupun pertumbuhan, sehingga memiliki konsekuensi anggaran yang tinggi dan pada akhirnya memilih untuk menggunakan fasilitas yang telah tersedia (kontrakan rumah) dan menunda sedikit waktu untuk mendapatkan kepemilikan bangunan (rumah) yang lebih baik. selanjutnya tabel berikut menunjukkan karakteristik penggunaan fasilitas tempat buang air besar bagi penduduk Kota Ternate.

Tabel 4.14. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2023

Karakteristik	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		Jumlah
	Milik Sendiri	Lainnya ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	88.22	11.78	100.00
Perempuan	93.40	6.60	100.00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	85.78	14.22	100.00
40 Persen Tengah	90.28	9.72	100.00
20 Persen Teratas	91.06	8.94	100.00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	84.22	15.78	100.00
SMP ke atas	89.82	10.18	100.00
Kota Ternate	88.90	11.10	100.00

Sumber : BPS, Susenas, Maret 2023

Tabel 4.15. Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utamayang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/DII., 2023

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/DII.						Jumlah
	Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang	Leding	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlin- dung/ Sumur Tak Terlin- dung	Mata Air Terlindung/ Mata Air Tak Terlindung	Lainnya ¹	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenis Kelamin KRT							
Laki-laki	NA	80.28	9.52	6.50	NA	1.98	100.00
Perempuan	NA	62.70	15.99	14.18	NA	NA	100.00
Kuintil Pengeluaran							
40 Persen Terbawah	NA	71.84	8.91	11.04	NA	5.64	100.00
40 Persen Tengah	NA	78.93	10.43	8.04	NA	NA	100.00
20 Persen Teratas	NA	85.02	12.32	NA	NA	NA	100.00
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD ke bawah	NA	62.94	10.54	22.13	NA	NA	100.00
SMP ke atas	NA	80.90	10.34	4.66	1.30	1.86	100.00
Kota Ternate	NA	77.97	10.37	7.51	1.20	2.15	100.00

Sumber : BPS, Susenas, Maret 2023

Berdasarkan data pada tabel Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/DII pada tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Ternate, dijelaskan bahwa secara umum masyarakat Kota Ternate dalam penggunaan air bersih bersumber dari PDAM (air leding), yakni sebesar 80,28% untuk karateritik kepala rumah tangga laki-laki dan karakteristik kepala rumah tangga perempuan sebesar 62,70%.

Selanjutnya dari akses terhadap komunikasi, data menunjukkan bahwa masyarakat Kota Ternate usia diatas 5 tahun telah mengakses internet dengan persentase sebesar 81,30%. Secara tekhnis untuk penjelasan akses internet dan

komunikasi berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik adalah yang dimaksudkan dengan telepon seluler (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti Short Messages Services (SMS), Multimedia Messages Service (MMS), e-mail dan akses internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu Global System for Mobile Telecommunications (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA). Sementara defisini untuk komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (portable) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa).

- a. Personal Computer (PC)/Desktop adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard.
- b. Laptop/Notebook adalah komputer yang cukup kecil untuk dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai komputer desktop, tetapi juga mencakup notebook dan netbook tetapi tidak termasuk tablet dan sejenis komputer genggam.
- c. Tablet (atau sejenis komputer genggam) adalah komputer yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam hal ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi, seperti set TV pintar dan perangkat dengan telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Tablet meskipun

bisa digunakan untuk menelepon, tidak dimasukkan dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah sebagai komputer.

Internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk world wide web dan membawa e-mail, berita, hiburan, dan file data. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e- voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-waroeng.

Program Sembako adalah pengembangan dari program BPNT. Nilai dari Program Sembako sebesar Rp150.000,- per bulan. Kriteria pangan yang diperoleh adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat. Jenis bahan pangan dalam program sembako yaitu sumber karbohidrat, seperti beras (dapat diganti jagung/sagu/ubi) dan sumber protein, seperti telur, daging/ayam/ikan, kacang-kacangan (misal tempe tahu). Komoditas bahan pangan sembako mengakomodir ketersediaan pangan lokal.

KPM diberikan kebebasan untuk memilih bahan pangan tersebut. Sejak Maret 2020, pemerintah menaikkan besaran manfaat program Sembako menjadi Rp200.000,-/KPM/bulan.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran dan, dalam cakupan lebih luas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) dan rentan berdasarkan Basis Data Terpadu serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Berikut beberapa tabel yang menjelaskan tentang data masyarakat kota ternate dalam mengakses internet dan alat telekomunikasi lainnya.

Tabel 4.16. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Tiga Bulan Terakhir, 2023

Karakteristik	Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Pernah Menggunakan Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll)
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	91.84	82.25
Perempuan	90.38	74.24
Kuintil Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	89.73	76.22
40 Persen Tengah	90.61	83.03
20 Persen Teratas	97.59	87.96
Pendidikan Tertinggi ART		
SD ke bawah	76.92	59.96
SMP ke atas	96.94	88.94
Kota Ternate	91.67	81.30

Sumber : BPS, Susenas, Maret 2023

Data pada tabel 4. 16 menunjukkan bahwa masyarakat kota ternate dalam mengakses internet dan menggunakan telepon seluler pada usia 5 (lima) tahun keatas didominasi oleh laki-laki untuk penggunaan telepon maupun akses internet. Masing-masing sebesar 91,84% untuk laki-laki dan 90,38% untuk perempuan dengan kategori penggunaan telpon seluler. Sedangkan untuk akses internet laki-laki sebesar 82,25% dan perempuan sebesar 74,24%. Selanjutnya untuk program perlindungan jaminan sosial secara Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima pada tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 4.17.

Tabel 4.17. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima pada tahun 2023

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
(1)	(2)
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	3.82
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ¹	1.83
Program Keluarga Harapan (PKH)	6.23

Catatan: ¹Menerima KKS baik yang *dapat menunjukkan kartu* maupun *tidak dapat menunjukkan kartu.*

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

4.4.4. Konsumsi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Ternate 2023, mengemukakan bahwa rata-rata penduduk kota ternate mengeluarkan uang sebesar Rp. 221.416 per orang per bulan untuk mengkonsumsi makanan jadi. (Susenas, 2023). Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik

mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Sementara yang dimaksudkan dengan konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi. Tabel 4.18 berikut memberikan penjelasan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.18. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2023

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-Rata Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	66,384	85,886	115,155	83,913
2. Umbi-umbian	4,418	6,357	8,047	5,917
3. Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	60,854	98,230	154,421	94,468
4. Daging	6,454	17,075	40,388	17,472
5. Telur dan Susu	19,579	39,522	44,977	32,619
6. Sayur-sayuran	47,800	70,999	98,177	67,127
7. Kacang-kacangan	6,446	10,543	14,684	9,727
8. Buah-buahan	15,767	29,822	68,669	31,944
9. Minyak dan Kelapa	14,539	18,623	27,449	18,748
10. Bahan Minuman	14,155	19,427	28,004	19,026
11. Bumbu-bumbuan	13,676	18,096	26,854	18,073
12. Bahan Makanan Lainnya	6,043	11,123	16,742	10,209
13. Makanan dan Minuman Jadi	127,421	227,184	398,581	221,416
14. Rokok dan Tembakau	52,604	129,628	204,993	113,804
Jumlah Makanan	456,139	782,514	1,247,141	744,463
15. Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	331,128	639,175	1,341,326	655,880
16. Aneka Barang dan Jasa	94,317	177,146	365,863	181,622
17. Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	19,357	48,772	95,453	46,302
18. Barang Tahan Lama	12,037	22,040	103,583	34,308
19. Pajak, Pungutan, dan Asuransi	26,164	40,484	105,981	47,819
20. Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	990	1,868	38,641	8,856
Jumlah Bukan Makanan	483,993	929,485	2,050,848	974,786
Rata-Rata Pengeluaran Kota Ternate	1,720.64	2,005.09	2,691.73	2,029.23

Sumber: BPS, Susenas Maret 2023

Tabel 4.19. Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari menurut
Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kkal), 2023

Kelompok Komoditas Makanan	Kelompok Pengeluaran			Total Rata-Rata Konsumsi Kalori
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	738.05	796.95	899.46	793.81
2. Umbi-umbian	22.45	23.62	20.99	22.63
3. Ikan/ Udang/ Cumi/Kerang	54.35	81.44	102.47	74.78
4. Daging	16.13	38.65	69.22	35.73
5. Telur dan Susu	26.69	43.72	50.36	38.22
6. Sayur-sayuran	23.64	31.38	35.52	29.11
7. Kacang-kacangan	20.76	29.69	36.36	27.44
8. Buah-buahan	26.49	39.89	56.89	37.91
9. Minyak dan Kelapa	220.54	269.29	317.19	259.31
10. Bahan Minuman	66.54	69.27	86.34	71.58
11. Bumbu-bumbuan	5.42	6.49	7.88	6.34
12. Bahan Makanan Lainnya	23.07	37.49	46.30	33.47
13. Makanan dan Minuman Jadi	250.91	342.40	427.82	322.79
14. Rokok dan Tembakau	-	-	-	-
Rata-Rata Konsumsi Kota Ternate	1,495.05	1,810.28	2,156.79	1,753.12

Sumber : BPS, Susenas Maret, 2023

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Kondisi Perekonomian Kota Ternate

5.1.1. Struktur dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada Triwulan III Tahun 2023 tercatat sebesar 25,13 persen (yoy) dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, PDRB ADHB Triwulan III Tahun 2023 tercatat sebesar Rp21,26 Triliun dan PDRB ADHK sebesar Rp12,4 Triliun. Meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara jauh melampaui nasional, sumbangan PDRB Maluku Utara terhadap Nasional masih sangat kecil, yaitu sebesar 0,40 persen. Sektor industri pengolahan masih mendominasi seiring dengan meningkatnya aktivitas pengolahan nikel, diikuti dengan sektor pertambangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari seluruh pemangku kepentingan agar momentum pertumbuhan yang ada dapat dioptimalkan dalam menciptakan trickle down effect bagi sektor-sektor lainnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkepanjangan.

Berbagai program dan kegiatan telah diimplementasikan oleh pemerintah kota ternate yang bersifat strategis dalam mewujudkan visi dan misi walikota ternate dengan mengusung tema besar “mandiri dan berkeadilan”. Implikasi dari ragam kebijakan melalui program kegiatan yang dilakukan terbaca bahwa mampu mendorong peningkatan pada beberapa

indikator makro ekonomi berdasarkan 17 indikator lapangan usaha. Kondisi ini tercermin pada nilai PDRB ADHB Kota Ternate pada tahun 2022 mengalami perkembangan yang sangat baik, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 12,3 Triliun dibanding pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.10,9 Triliun. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada seluruh sektor lapangan usaha dan adanya inflasi.

Pada PDRB ADHK dengan menggunakan tahun dasar 2010, maka dikemukakan bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2022 yakni sebesar Rp.7,7 Triliun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat PDRB sebesar Rp.7,3 Triliun. Atas kondisi ini, tampak jelas bahwa pertumbuhan ekonomi kota ternate secara total pada tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,32%. Angka pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa perekonomian Kota Ternate mulai mengalami akselerasi secara baik bila dibandingkan dengan kondisi perekonomian tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,58 %. Angka pertumbuhan ini dapat dimaklumi karena hampir semua wilayah di Indonesia masih pada tahap pemulihan ekonomi akibat terpaan pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Jika dilihat Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2022 Se-Provinsi Maluku Utara (dalam milyar rupiah), maka sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2022

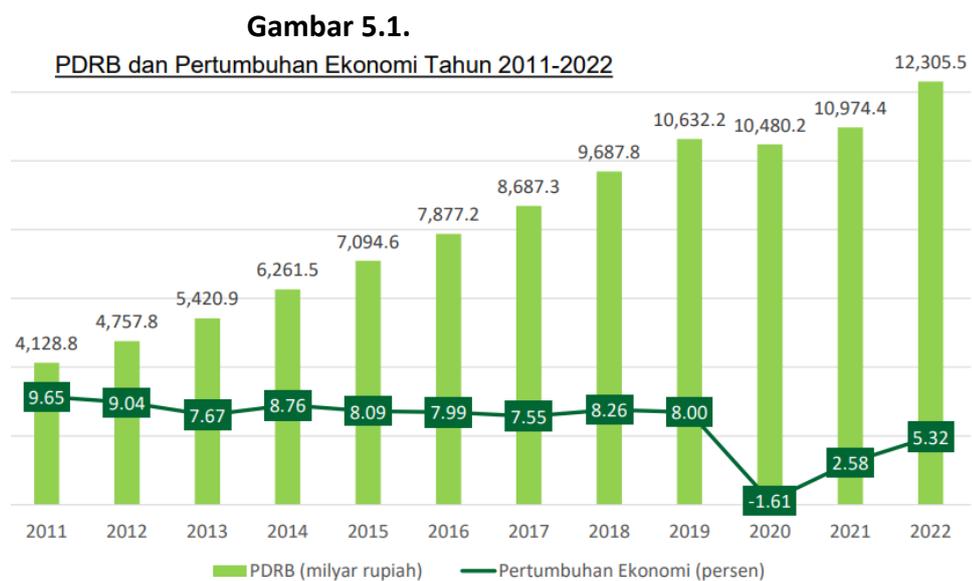
Se-Provinsi Maluku Utara (dalam milyar rupiah)

Wilayah	2020	2021	2022
Halteng	3,291.7	9,658.1	21,137.8
Halsel	8,714.8	10,925.0	14,301.1
Ternate	10,480.2	10,974.4	12,305.5
Halut	5,689.6	6,002.9	6,436.7
Haltim	3,541.3	3,930.4	4,180.7
Tikep	2,939.6	3,028.4	3,292.9
Kepulauan Sula	2,507.6	2,597.9	2,866.2
Halbar	2,276.4	2,352.7	2,532.2
Pulau Taliabu	1,481.4	1,710.0	1,877.1
Pulau Morotai	1,572.5	1,642,0	1,749.1

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 5.1. dikemukakan bahwa laju PDRB atas dasar harga berlaku pada 10 (sepuluh) wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. pada tahun 2020 dan 2021 PDRB ADHB tertinggi di wilayah Kota Ternate. Akan tetapi kondisi ini mengalami perubahan di tahun 2022, dimana kota Ternate masih tergolong tinggi, akan tetapi PDRB ADHB tertinggi adalah di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, yakni sebesar 21,137.8 dan 14,301.1 (dalam Milyar).

Jika dilihat Kontribusi Perekonomian Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Maluku Utara Tahun 2020 - 2022 (dalam persen), maka dapat jelaskan bahwa terjadi pergeseran dominasi perekonomian Maluku Utara yang semula sebagian besar disumbangkan oleh Kota Ternate disusul Halmahera Selatan, mulai digeser oleh Halmahera Tengah. Dimana pada tahun 2020 Kota Ternate memberikan kontribusi perekonomian terhadap PDRB Maluku Utara sebesar 24,78%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 20,91% dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 17,36%. Sementara Halmahera Tengah dengan kontribusi perekonomian pada tahun 2020 sebesar 20,60% mengalami peningkatan menjadi 20,82% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 walaupun sedikit mengalami penurunan akan tetapi masih tetap menjadi kontributor tertinggi pada PDRB Maluku Utara yakni sebesar 20,17%.

Khusus untuk Kota Ternate perkembangan perekonomian wilayah pada tahun 2011 sampai dengan 2022 digambarkan sebagaimana pada grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik, Sensus Pertanian 2023

Berdasarkan grafik gambaran perekonomian sebagaimana tersaji, dikemukakan bahwa struktur perekonomian di Kota Ternate cenderung tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 2011 hingga 2022, dimana, struktur ekonomi masih tetap didominasi oleh Sektor Perdagangan (sekitar 24 persen), Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (sekitar 17-18 persen), serta sektor Transportasi dan Pergudangan (sekitar 12-15 persen). Laju pertumbuhan perekonomian terendah pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

5.1.2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk mengetahui pendapatan regional dalam hubungannya dengan ekonomi adalah PDRB Per kapita yang umumnya digunakan sebagai indikator makro dalam mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada dasarnya memberikan gambaran tentang nilai rata-rata PDRB yang diterima oleh setiap penduduk atau masyarakat.

Berdasarkan data PDRB per kapita kota ternate dalam lima tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Implikasi lanjut dari kondisi peningkatan PDRB per kapita adalah bahwa kesejahteraan masyarakat kota ternate terus mengalami perbaikan, meskipun variabel inflasi dan dampak keterpurukan ekonomi pasca pandemi masih terus dirasakan. Pada tahun 2021 PDRB Per kapita ADHK sebesar 35,07 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi sebesar 35,92 juta rupiah pada tahun 2022 atau terjadi peningkatan sebesar 4,88%. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah terjadinya penurunan angka kemiskinan. Sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kota Ternate melalui tugas pokok dan fungsi beberapa Perangkat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat telah diarahkan sejumlah program dan kegiatan yang keberpihakannya untuk penurunan angka kemiskinan di Kota Ternate. Terjadi penurunan jumlah Penduduk Miskin dari 3,55 persen di Tahun 2021 turun menjadi 3,11 persen di Tahun 2022 atau 8,45 ribu jiwa menjadi 7, 54 ribu jiwa.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendapatan per kapita merupakan pedoman dan dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan

wilayah. Pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB ADHK. Pendapatan per kapita pada tahun 2017 sebesar Rp. 19,19 juta meningkat menjadi Rp. 25,1 juta pada tahun 2021. Meskipun secara nominal masih terpaut jauh dengan pendapatan per kapita secara nasional, akan tetapi jarak atau gap setiap tahunnya terus mengalami atau menunjukkan tren yang menurun. Secara rinci trend pendapatan per kapita dalam wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana disajikan berikut ini :

**Tabel 5.2. Pendapatan per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK per Kapita (Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	12,01	12,42	12,87	12,74	11,54
2	Halmahera Tengah	25,32	26,35	27,31	33,67	90,40
3	Kepulauan Sula	14,75	15,31	15,97	15,70	15,80
4	Halmahera Selatan	16,55	18,77	20,76	23,75	25,95
5	Halmahera Utara	19,09	19,20	19,37	18,98	19,36
6	Halmahera Timur	22,41	23,53	24,12	23,59	26,80
7	Pulau Morotai	14,49	15,08	15,33	15,31	14,24
8	Pulau Taliabu	15,57	17,26	18,70	18,76	19,22
9	Ternate	27,89	29,53	31,26	30,30	35,92
10	Tidore Kepulauan	18,00	18,88	19,84	19,88	17,76
	Maluku Utara	19,19	20,31	21,18	21,91	25,10
	Indonesia	37,85	39,34	41,02	39,78	40,78

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah

Berdasarkan data sebagaimana pada tabel 5.2. dapat dijelaskan bahwa dari 10 Kabupaten/Kota, tercatat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian pendapatan per kapita di atas provinsi pada tahun 2021, yaitu Halmahera Tengah, Ternate, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur. Adapun 3 (tiga) kabupaten/kota tercatat mengalami pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita yang negatif pada tahun 2021, yaitu Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan

Tidore Kepulauan. Perkembangan dan laju pertumbuhan Pendapatan per Kapita menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional.

Dengan ketersediaan data ini, maka sudah sepatutnya daerah-daerah dengan tingkat pendapatan per kapita negatif harus terus melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mampu menggenjot pembangunan ekonomi, tentunya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan memberikan dampak bagi nilai tambah bagi daerah dan masyarakat, sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapitanya. Hal ini penting dalam rangka, mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi dan pembangunan pada suatu wilayah. Berikut rincian laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 5.3. Laju Pertumbuhan PDRD atas Dasar Harga Kosntan

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	3,37	3,40	3,56	(0,96)	(9,41)
2	Halmahera Tengah	2,96	4,07	3,63	23,30	168,45
3	Kepulauan Sula	2,69	3,78	4,35	(1,71)	0,63
4	Halmahera Selatan	14,22	13,36	10,60	14,45	9,26
5	Halmahera Utara	4,62	0,57	0,88	(2,01)	1,99
6	Halmahera Timur	4,33	5,03	2,50	(2,22)	13,64
7	Pulau Morotai	3,57	4,13	1,65	(0,15)	(6,99)
8	Pulau Taliabu	4,06	10,83	8,38	0,32	2,42
9	Ternate	5,07	5,87	5,88	(3,06)	18,54
10	Tidore Kepulauan	4,79	4,89	5,07	0,20	(10,67)
	Maluku Utara	5,59	5,82	4,29	3,46	14,57
	Indonesia	3,79	3,93	4,27	(3,03)	2,51

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, diolah

5.1.3. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sebaliknya, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Inflasi dipandang berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Dengan adanya inflasi, maka harga barang-barang di pasar akan naik sedangkan penghasilan masyarakat tidak mengalami perubahan seiring inflasi. Kondisi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.

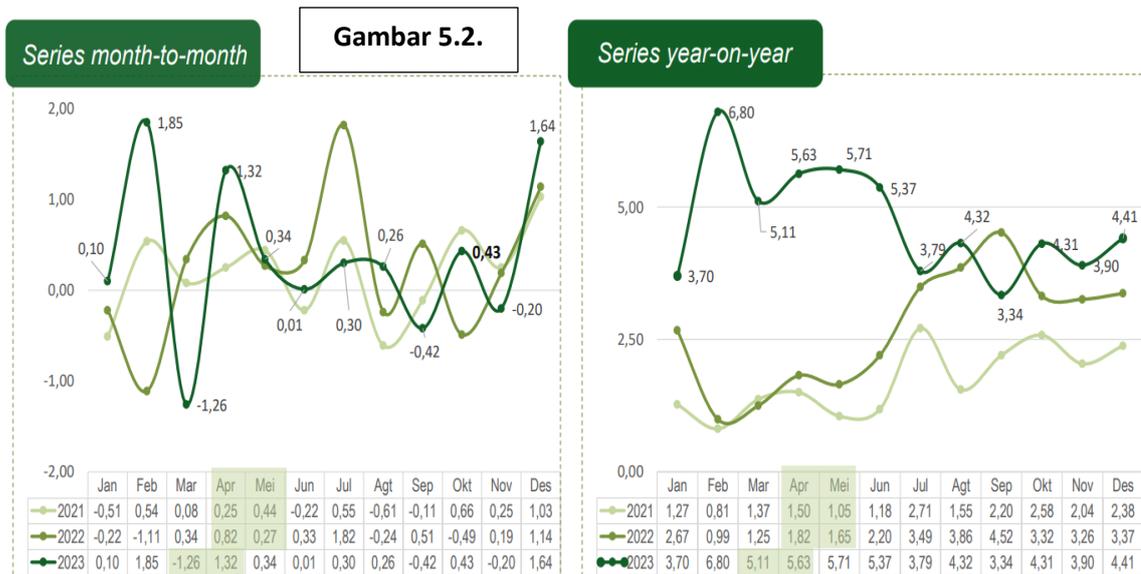
Laju inflasi Kota Ternate pada tahun 2022 sebesar 3,37%. Penyebab terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran. Yaitu; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,79%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08%; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,31%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,56%, kelompok transportasi sebesar 19,56%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,18%; kelompok penyedia makanan dan minuman restoran sebesar 0,10%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,93%; sementara kelompok pengeluaran yang mengalami

penurunan indeks adalah kelompok kesehatan sebesar 0,28% dan kelompok informasi, komunikasi, jasa keuangan sebesar 0,37%.

Jika di lihat tingkat Inflasi Maluku Utara – yang sebenarnya menggunakan tingkat proyeksi inflasi Kota Ternate - di sepanjang Triwulan III Tahun 2023, dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 yang berada pada kisaran angka 5 persen (yoy). Meskipun demikian, angka inflasi pada Triwulan III Tahun 2023 ini lebih tinggi daripada inflasi nasional. Pada September 2023, inflasi tercatat sebesar 3,34 persen (yoy) dengan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi dipegang oleh pakaian dan alas kaki disebabkan adanya kenaikan harga baju muslim; serta makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan harga barang pokok seperti beras. Meskipun sudah melandai, akan tetapi tingginya inflasi masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Kota Ternate sebagai kota inflasi di Maluku Utara, mengingat ancaman inflasi yang tinggi karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam menjelang hari raya Natal dan tahun baru.

Perkembangan tingkat inflasi desember 2023 Kota Ternate merepresentasikan inflasi Provinsi Maluku Utara. Sejak awal tahun 2023, tingkat inflasi *year-on-year* Kota Ternate cukup tinggi, sempat menurun di pertengahan tahun, akan tetapi kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok rumah tangga mendorong inflasi di akhir tahun 2023. Kendati demikian harus diakui bahwa pada dasarnya secara keseluruhan harga komoditas di Kota

Ternate cenderung fluktuatif. Beras, angkutan udara, angkutan laut, dan bahan bakar rumah tangga menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Kota Ternate secara *year-on-year* Desember 2023. Secara rinci inflasi, sebagaimana tersaji pada grafik berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, ST 2023

5.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini bermanfaat untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan

pemerataan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi selama kurun tahun 2017-2021 pada rentang 0,300 sampai 0,330.

Indeks gini di tahun 2021 merupakan capaian yang terendah dalam lima tahun terakhir, dimana titik tertingginya 0,330 tercatat pada tahun 2018 dan 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021, indeks Gini seluruh kabupaten/kota tercatat lebih rendah dari indeks gini di tingkatan provinsi. Capaian indeks gini terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 0,240 dan yang tertinggi di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 0,290. Dalam lima tahun terakhir, Indeks gini Provinsi Maluku Utara tercatat masih senantiasa berada di bawah Indeks gini secara nasional. Indeks Gini Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun tahun 2017-2021 yang dibandingkan dengan indeks gini secara nasional. Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara, kabupaten/kota maupun secara nasional masih berada pada ketimpangan rendah ($<0,4$) sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4 Indeks Gini Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Administrasi Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	0,240	0,240	0,250	0,240	0,280
2	Halmahera Tengah	0,290	0,360	0,290	0,330	0,270
3	Kepulauan Sula	0,270	0,300	0,290	0,300	0,240
4	Halmahera Selatan	0,240	0,250	0,260	0,260	0,270
5	Halmahera Utara	0,270	0,330	0,240	0,280	0,270
6	Halmahera Timur	0,240	0,250	0,280	0,300	0,260
7	Pulau Morotai	0,320	0,260	0,280	0,250	0,290
8	Pulau Taliabu	0,240	0,250	0,240	0,250	0,250
9	Ternate	0,280	0,270	0,270	0,270	0,260
10	Tidore Kepulauan	0,230	0,310	0,260	0,260	0,250
	Maluku Utara	0,320	0,330	0,310	0,330	0,300
	Indonesia	0,380	0,384	0,391	0,385	0,381

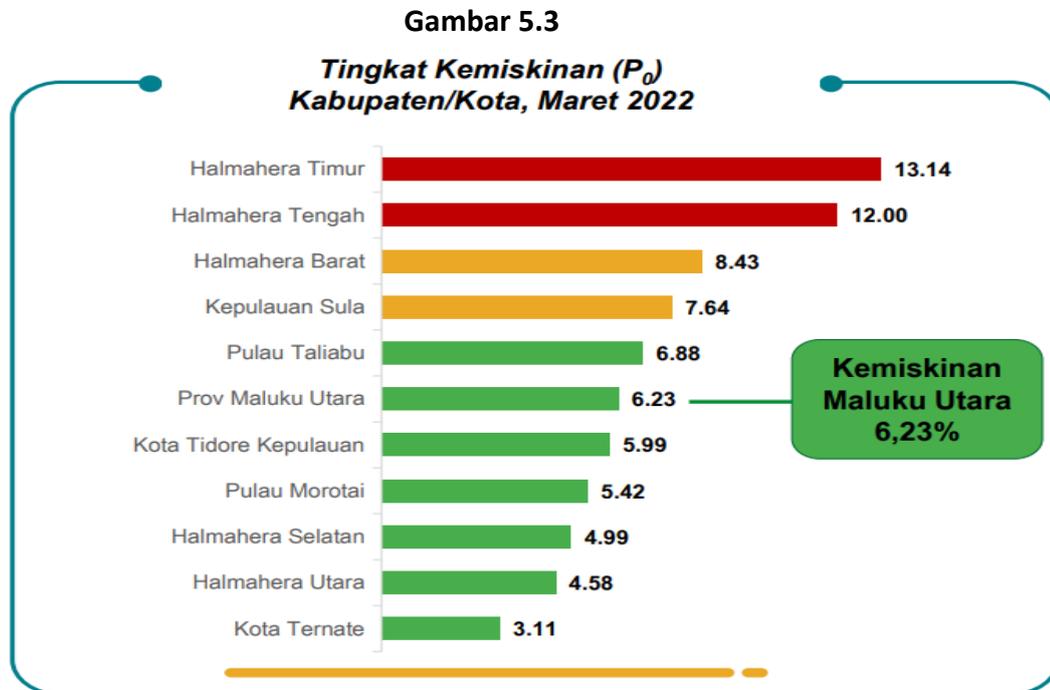
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

5.1.5. Tingkat Kemiskinan

Secara konsep kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Secara makro data kemiskinan tersedia sejak tahun 1976 – sekarang. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah menggunakan konsep *Basic Needs Approach*, yakni didasarkan pada garis kemiskinan makanan (2100 kkal per kapita per hari) + non makanan. Hasil yang didapatkan adalah data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap wilayah berdasarkan *ESTIMASI*. Kegunaan dari analisis kemiskinan adalah untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis. Tentu dengan catatan tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin, sehingga tidak operasional untuk program bantuan langsung.

Berbeda dengan data kemiskinan mikro dengan data yang tersedia sejak tahun 2005, 2008, 2011, 2015, 2022-2023, dimana pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan mendasarkan pada indeks atau PMT dari ciri-ciri Rumah Tangga miskin (variabel non moneter) yang dapat dikumpulkan dengan mudah. Sumber data yang digunakan adalah PSE2005, PPLS2008, PPLS2011, PBDT2015, Regsosek 2022-2023. Pendekatan ini akan menghasilkan data jumlah rumah tangga sasaran (Menurut Kategori Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, atau sesuai rangking) *by name by address*. Kegunaannya untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan

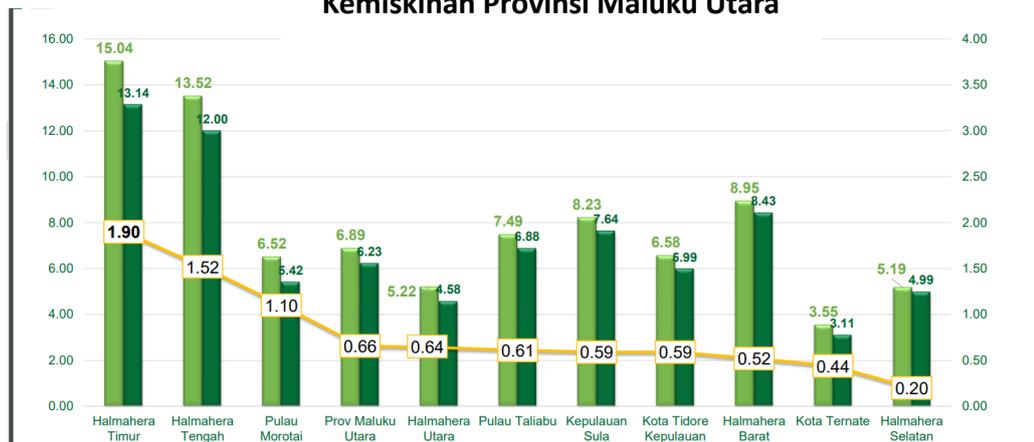
Perlindungan Sosial. Untuk lebih rinci tentang kondisi kemiskinan di Kota Ternate dapat tersaji pada gambar berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik, ST 2023.

Berdasarkan data sebagaimana tersaji, dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2022 tercatat di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 13,14 persen, diikuti Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 12,00 persen sedangkan terendah di Kota Ternate sebesar 3,11 persen. Hasil ini turut serta mengkonfirmasi bahwa tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah perdesaan yang direpresentasikan dengan tingginya angka kemiskinan pada wilayah-wilayah dengan basis lapangan usaha adalah dari sektor pertanian. Kendati demikian, kecenderungan penurunan kemiskinan masing-masing wilayah di Provinsi Maluku Utara setiap tahun menunjukkan adanya tren yang menurun. Sebagaimana tersaji pada grafik berikut:

Gambar 5.4. Grafik Penurunan Angka Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

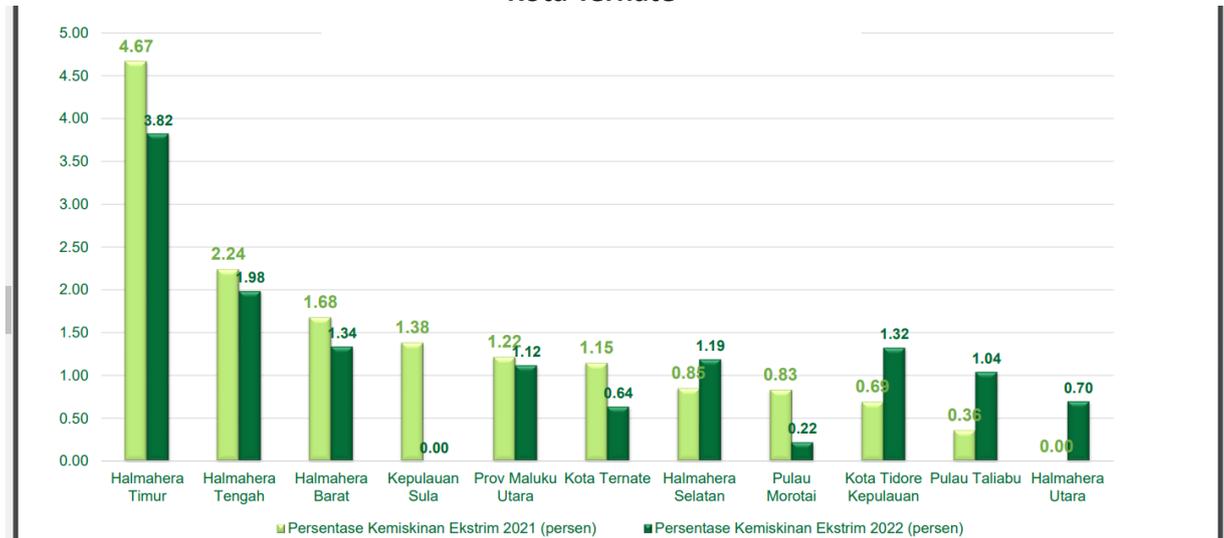


Sumber : Badan Pusat Statistik, ST 2023.

Berdasarkan grafik sebagaimana tersaji diatas, dikemukakan bahwa kendati mengalami trend penurunan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah Kota Ternate akan tetapi trend penurunannya belum secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk upaya penurunan kemiskinan di Kota Ternate harus menjadi prioritas dalam rumusan agenda pembangunan kedepan. Dengan kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Ternate yang mengalami penurunan sangat baik, yakni dari 1,15% menjadi 0,64% maka diperlukan adanya upaya serius pemerintah daerah Kota Ternate untuk terus melakukan terobosan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Mengingat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek lainnya. Beberapa aspek selain aspek ekonomi yang perlu diperhatikan adalah aspek lingkungan, aspek individu dan aspek sosial. Aspek ekonomi berkaitan dengan tidak memiliki akses permodalan dan pasar, biaya produksi sektor pertanian tinggi dan harga jual rendah, ketidakpastian pekerjaan, dimana pekerjaan bergantung pada alam dan

terkena PHK, serta permasalahan ketimpangan, yakni upah pekerja lebih rendah. Secara rinci kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Ternate sebagaimana tersaji pada grafik berikut:

Gambar 5.5. Kondisi Kemiskinan di Kota Ternate



Sumber : Badan Pusat Statistik, ST 2023

5.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah Indeks pembangunan manusia (IPM), hal ini karena IPM merupakan suatu ukuran kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan konsep BPS, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 4 indikator, yakni Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Paritas Daya Beli.

Merujuk data BPS, selama beberapa tahun terakhir capaian pembangunan manusia Kota Ternate yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) skornya selalu diatas 80 dengan kategori Sangat Tinggi, ini sebuah prestasi yang baik bagi Pemerintah Kota Ternate. Sempat mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu menjadi 79,82 dari 80,03 di tahun 2019 sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022 skor IPM terus mengalami peningkatan dan mencapai angka 80,14 di 2021 serta 80,81 di 2022. Selama periode 2010-2022, IPM Kota Ternate mencatat skor pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,64.

Jika dicermati trend peningkatan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, maka berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel berikut menunjukkan adanya trend positif. Dimana, secara keseluruhan kabupaten/kota di Maluku Utara pada setiap tahun mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021-2023 dengan rata-rata laju pertumbuhan 2022 dibanding 2023 masih dibawah 0,50. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Secara rinci data Indeks Pembangunan Manusia dalam wilayah Maluku Utara dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 5.5 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota dalam wilayah
Maluku Utara**

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Halmahera Barat	65,56	66,20	66,91
Halmahera Tengah	65,82	66,49	67,48
Kepulauan Sula	63,80	64,70	65,29
Halmahera Selatan	64,19	65,06	65,83
Halmahera Utara	67,82	68,38	69,05
Halmahera Timur	67,00	67,93	68,82
Pulau Morotai	62,90	63,80	64,73
Pulau Taliabu	60,73	61,64	62,31
Ternate	80,14	80,81	81,35
Tidore Kepulauan	70,99	71,55	72,40
Maluku Utara	68,76	69,47	70,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

5.1.7. Indeks Pembangunan Gender

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian IPM laki-laki dan perempuan. IPG Kota Ternate dapat terlihat sebagaimana tersaji pada tabel IPG Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

Tabel 5.6. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Indeks P embangunan Gender				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Halmahera Barat	88,20	87,79	88,20	88,30	88,48
2	Halmahera Tengah	89,52	89,34	89,61	89,53	89,78
3	Kepulauan Sula	92,13	92,14	92,14	91,97	92,36
4	Halmahera Selatan	85,83	86,41	86,60	86,49	87,30
5	Halmahera Utara	89,14	88,81	89,35	89,44	89,35
6	Halmahera Timur	81,29	81,30	81,41	81,43	81,56
7	Pulau Morotai	68,57	69,40	69,86	69,75	69,75
8	Pulau Taliabu	81,87	82,82	83,58	83,29	83,29
9	Ternate	91,89	91,92	92,10	91,83	91,87
10	Tidore Kepulauan	95,33	95,12	95,13	95,47	95,84
	Maluku Utara	89,15	89,50	89,61	89,55	89,75
	Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: BPS & BPS Provinsi Maluku Utara, 2022

5.2. Analisis Kinerja Keuangan (APBD) Kota Ternate

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Tabel berikut merupakan hasil analisis efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 5.7. Analisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	REPD (%)	Kriteria
2020	46.130.000.000	49.802.907.269	107,96	Sangat Efektif
2021	57.425.000.000	59.028.041.466	102,79	Sangat Efektif
2022	64.340.500.000	66.655.543.333	103,60	Sangat Efektif
2023	71.502.853.083	73.502.853.083	102	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.7. dikemukakan bahwa tingkat rasio efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah secara umum adalah dengan kategori sangat efektif. Hal itu ditunjukkan dengan data bahwa rata-rata setiap tahun anggaran realisasi pajak daerah selalu melampaui dari target pajak daerah. kondisi ini memberikan harapan bahwa kinerja keuangan di Kota Ternate mengalami peningkatan dari sisi pajak daerah. Selain itu, dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian di kota ternate semakin membaik dan kondusif sehingga mendorong peningkatan pendapatan dari sisi pajak daerah. Kendati demikian, kondisi berbeda ditemukan pada analisis rasio efektifitas total target PAD terhadap realisasi PAD pada beberapa tahun di Kota Ternate. Secara rinci dijelaskan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8. Analisis Rasio Efektifitas Total Target PAD Terhadap Total Realisasi PAD

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD	REPAD (%)	Kriteria
2020	82.548.422.000,00	75.225.056.452.46	91,13	Efektif
2021	123.097.508.130,58	87.013.552.298.96	70,69	Kurang Efektif
2022	154.057.010.943,00	95.542.467.541,84	62,02	Kurang Efektif
2023	154.057.010.943,00	95.542.467.541,84	62,02	Kurang Efektif

Sedangkan hasil analisis pada tabel 5.8. menunjukkan bahwa rasio efektifitas dari total target pendapatan asli daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 dengan kriteria efektif. Akan tetapi pada tahun 2021,2022 dan 2023 kriterianya adalah kurang efektif. Terdapat beberapa variabel penting yang menjadi penyebab kurang efektifnya target dan realisasi PAD di Kota Ternate, diantaranya adalah masih tingginya indikasi kebocoran akibat pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah masih dilakukan secara manual. Selain itu, optimalisasi potensi pendapatan asli daerah belum dilakukan secara maksimal oleh organisasi perangkat daerah yang berkontribusi dalam menyumbangkan dan melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah di kota ternate. Lebih lanjut, identifikasi sumber-sumber pendapatan secara komprehensif belum dilakukan secara maksimal sehingga data base yang menjadi dasar untuk mengukur secara riil pendapatan asli daerah masih belum dapat dilakukan secara terukur. Lemahnya data base dapat menyebabkan terdapat sumber pendapatan yang *loss* dari pungutan pajak daerah. Selanjutnya dari sisi tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.9. berikut:

Tabel 5.9. Analisis Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD (%)	Kriteria
2020	909.457.133.678	922.049.562.212	98,5	Efisien
2021	941.859.298.693	959.441.189.053	98,0	Efisien
2022	914.939.290.477	943.439.504.753	97,0	Efisien
2023	931.439.504.753	960.439.504.753	97,0	Efisien

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 5.8. dikemukakan bahwa tingkat efisiensi belanja dibandingkan dengan realisasi pendapatan merujuk pada kriteria Kinerja Keuangan, maka di ketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate tahun 2020 – 2023 menunjukan tingkat efisiensi yang lebih baik karena rasionya di bawah 100% dan senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan rasio sangat efisien.

Analisis Keserasian Belanja

Tabel 5.10. Analisis Keserasian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tahun Anggaran	Total Belanja	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	1.045.542.015.614	726.903.745.293	86-87
2021	1.015.934.112.918	753.024.894.046	89-90
2022	1.024.545.601.039	727.967.470.000	87-88
2023	1.128.324.782.624	848.993.051.806	89-90

Perhitungan rasio keuangan terhadap belanja negara pada Laporan Keuangan khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja APBD merupakan suatu langkah tepat, sehingga memberikan gambaran komprhensif pengelolaan anggaran pada setiap tahun berjalan. Salah satu yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai keserasian belanja. Analisis ini merupakan salah satu usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran pada laporan keuangan. Perhitungan rasio analisis keserasian belanja yang

terdiri dari rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja. Belanja operasi terdiri dari realisasi atas belanja pegawai dan realisasi atas belanja barang. Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara rasio suatu pos belanja dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tersaji pada tabel 5.4. dikemukakan bahwa dari sisi analisis tingkat keserasian belanja antara belanja operasi terhadap total belanja ditemukan bahwa belum terdapat keserasian belanja pada kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Ternate. Dimana, dalam 4 (empat) tahun, rasio belanja operasi terhadap total belanja pada struktur APBD sangat didominasi oleh belanja operasi bila dibandingkan dengan belanja-belanja lainnya, dengan rasio belanja rata-rata sebesar 86-90%. Selanjutnya dilakukan analisis keserasian belanja terhadap total belanja daerah sebagaimana tersaji pada tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.11. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tahun Anggaran	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2020	1.045.542.015.614	182.553.388.385	13-14
2021	1.015.934.112.918	168.649.562.647	13-14
2022	1.024.545.601.039	167.199.068.576	13-14
2023	1.128.324.782.624	180.831.730.818	12-13

Diketahui bahwa struktur belanja program dan kegiatan dalam APBD sangat berperan dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera. Pengalokasian anggaran belanja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan mendorong pertumbuhan yang positif dan pada akhirnya berimplikasi secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan APBD sendiri tidak terlepas proses politik di daerah antara pihak eksekutif dan legislatif. Adanya tarik-ulur kepentingan atas penganggaran belanja mengakibatkan struktur alokasi APBD bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dewasa ini, struktur APBD dan alokasi belanja APBD di berbagai daerah dinilai masih belum efektif. Terdapat beberapa variabel penyebabnya, antara lain ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah maupun PPPK setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas, dan

pembelanjaan lain yang tidak tepat. Seharusnya, belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan jembatan, yang justru perlu ditingkatkan (Yudhoyono, 2011).

Hasil analisis sebagaimana pada tabel 5.6. menunjukkan bahwa rasio belanja modal pada struktur belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Ternate mengalami ketimpangan yang signifikan bilamana dibandingkan dengan rasio belanja operasi. Rata-rata setiap tahun rasio belanja modal terhadap total belanja APBD sebesar 13-14% selama 4 tahun terakhir. Dengan semakin timpangnya alokasi belanja antara operasi dan modal, maka menjadi salah satu penyebab muncul berbagai masalah yang belum terselesaikan, diantaranya infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat belum terselesaikan. Permasalahan sampah yang belum tertangani secara baik, serta ragam permasalahan lainnya yang membutuhkan penanganan yang tanggap serta tepat. Tentu, semua permasalahan ini disebabkan kapasitas fiskal Kota Ternate masih relative rendah, serta kecenderungan alokasi yang kurang tepat, sehingga permasalahan sebagaimana disampaikan belum sepenuhnya terselesaikan. Dibutuhkan upaya memperluas ruang peningkatan pendapatan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pembangunan didaerah.

Menurut Badrudin (2012), Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bentuk belanja operasional maupun belanja modal diharapkan akan meningkatkan aktivitas yang memicu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, diharapkan sejalan dengan peningkatan alokasi

pendapatan masyarakat untuk konsumsi kebutuhan primer, 2 sekunder dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut lebih kaya, lebih sehat, dan lebih berpendidikan sebagai indikator pembangunan manusia.

Selanjutnya, untuk mengukur kinerja keuangan daerah, beberapa indikator dan variabel yang seringkali digunakan, salah satunya adalah mengukur rasio pertumbuhan keuangan daerah. Rasio pertumbuhan keuangan daerah terdiri atas 4 (empat) indikator, yaitu rasio pertumbuhan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja operasi. Untuk rincian besaran dari keempat indikator rasio pertumbuhan keuangan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.12. Analisis Rasio pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Ternate

Keterangan	Tahun				Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	
PAD	75.225.056.452,46	87.013.552.298.,96	95.542.467.541,84	154.057.010.943	
Growth PAD		%	%	%	
Pendpatn	922.049.562.212,46	959.441.189.053,48	943.439.504.753,84	1.128.324.782.624	
Growth Pendapatan		%	%	%	
Belanja Operasi	726.903.745.293	753.024.894.046	727.967.470.000	848.993.051.806	
Growth B. Operasi		%	%	%	
Belanja Modal	182.553.388.385	168.649.562.647	167.199.068.576	180.831.730.818	
Growth B. Modal		%	%	%	

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa laju rasio pertumbuhan keuangan daerah Kota Ternate pada 4 (empat) tahun, yakni 2020,2021,2022, dan 2023 menunjukkan adanya trend yang terus mengalami peningkatan. Baik dari sisi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah maupun belanja operasi. Akan tetapi, untuk belanja modal mengalami trend penurunan rasio pertumbuhan pada tahun 2020 ke 2021 dan selanjutnya untuk tahun 2021 terhadap rasio pertumbuhan tahun 2022 juga mengalami penurunan.

Sehingga jika disimpulkan arah pertumbuhan keuangan daerah Kota Ternate secara umum menuju ke arah positif untuk rasio pertumbuhan keuangan pada 3 (tiga) variabel, yakni pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dan belanja operasi, sedangkan belanja modal memiliki arah positif pada tahun 2020, kemudian pertumbuhan mengarah ke negatif pada tahun 2021 dan 2022, dan pada tahun 2023 kembali menunjukkan arah pertumbuhan yang positif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan pada kajian ini sebagai berikut:

- ▶ Rasio Efektifitas dan Efisiensi terhadap pajak maupun keuangan daerah menunjukkan bahwa kinerja pajak efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah dari sisi belanja.
- ▶ Dari sisi keserasian belanja, pada struktur APBD Kota Ternate dalam 4 tahun dominan belanja operasi dengan kecenderungan belanja modal yang mengalami penurunan.
- ▶ Relevansi kinerja keuangan dengan indikator kesejahteraan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.
- ▶ Pergerakan pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan pada kajian ini sebagai berikut:

- ▶ Diperlukan adanya terobosan dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sisi pajak dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang HKPD

- ▶ Diharapkan agar pemanfaatan pendapatan untuk belanja menggunakan sistem anggaran berimbang (Efisien baik, tapi tidak selamanya memberi dampak baik)
- ▶ Perlu kebijakan untuk terus mendorong perbaikan pada indikator kesejahteraan melalui pemberian akses dan penguatan kapasitas
- ▶ Dibutuhkan strategi optimalisasi pendapatan berbasis digital untuk mengurangi kebocoran pada beberapa spot pendapatan.